

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA  
BARAT SAKATO BAGI PENDUDUK MISKIN  
DI KOTA PADANG**

**TESIS**

**Tesis Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**DISUSUN OLEH :  
DEVI DIANY  
NPM. 1910018412023**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN TESIS**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA  
BARAT SAKATO BAGI PENDUDUK MISKIN  
DI KOTA PADANG**

**OLEH**

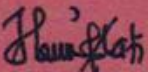
**DEVI DIANY  
NPM. 1910018412023**

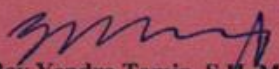
**Penulisan Tesis Hukum dengan Judul di Atas Diajukan  
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Menyelesaikan  
Program Magister Ilmu Hukum  
Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal 24 Februari 2022  
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji**

**Menyetujui**

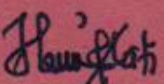
**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Maiyestati, S.H.,M.H.**

  
**Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H.**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

  
**Dr. Maiyestati, S.H.,M.H.**

**PENGESAHAN TESIS**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA  
BARAT SAKATO BAGI PENDUDUK MISKIN  
DI KOTA PADANG**

**Disiapkan dan Disusun**

**Oleh  
DEVI DIANY  
NPM. 1910018412023**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 28 Februari 2022  
dan Dinyatakan LULUS**

**TIM PENGUJI**

**Ketua**

  
**Dr. Maiyestati, S.H.,M.H.**

**Sekretaris**

  
**Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H.**

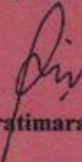
**Anggota**

  
**Prof. Dr. Darmini Roza, S.H.,M.H.**

**Anggota**

  
**Dr. Sadnijar Pebrihariati. R, S.H.,M.H.**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
**Dr. Uning Pratimaratri, SH, M.Hum**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Diany

NPM : 1910018412023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  
JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO  
BAGI PENDUDUK MISKIN DI KOTA PADANG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 28 Februari 2022



**Devi Diany**  
NPM.1910018412023

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN  
DI SAKATO SUMATERA BARAT BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA  
PADANG**

**Devi Diany<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta  
E-mail: devie.sharien@gmail.com**

**ABSTRAK**

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Program JKN pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun masih ada masyarakat miskin yang sakit dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan. Permasalahan dalam tesis ini adalah ; 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumbar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato dalam memberikan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Padang sebelum diintegrasikan dengan JKN 2) Bagaimana implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 setelah terintegrasi dengan JKN, dan 3) Bagaimana solusi bagi masyarakat miskin yang sakit dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan? Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitiannya, Pemerintah Kota Padang telah memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Bagi masyarakat miskin yang sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan, mereka bisa mendaftarkan ke Dinas Sosial Kota Padang.

**Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Penduduk Miskin, Jaminan Kesehatan Sakato Sumatera Barat**

**IMPLEMENTATION of REGIONAL REGULATION NUMBER 10 of 2011  
CONCERNING IMPLEMENTATION of HEALTH INSURANCE  
in WEST SUMATRA SAKATO for THE POOR PEOPLE in PADANG CITY**

**Devi Diany<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta  
E-mail: devie.sharien@gmail.com**

**ABSTRACT**

Health is a basic human need that must be met by the Government as mandated by Article 28 H and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Government bears the health financing of the poor through the National Health Insurance (JKN) Program. The poor who are not enrolled in the central JKN Program will be the responsibility of the Local Government. But there are still poor people who are sick and do not have Health Insurance. The problems in this thesis are ; 1) How is the implementation of West Sumatra Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning the Implementation of Sakato's West Sumatra Health Insurance in providing Health Insurance for the poor in Padang City before being integrated with JKN? 2) How is the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2011 after being integrated with JKN?, and 3) What is the solution for the poor who are sick and do not have Health Insurance? This type of research is descriptive analysis with a sociological juridical approach. Data collection techniques are interviews, field observations and document studies. The data analysis technique was carried out qualitatively. The results of his research, the Padang City Government has provided health protection for the poor according to Regional Regulation No. 10 of 2011. For the poor people who are sick and do not have any health insurance, they can register with the Padang City Social Agency.

**Keywords: Health Insurance, Poor Population, Sakato West Sumatra Health Insurance**

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillahilalrahbil ‘alamin, segala pujibagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan Tesis ini. Shalawat dan salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan dan suri tauladan umat manusia, yang telah membawa manusia dari kegelapan hingga ke masa yang terang benderang yang dirasakan hingga saat ini, Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarga dan pengikut beliau.

Adapun Tesis Penulis dengan judul :“**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO BAGI PENDUDUK MISKIN DI KOTA PADANG**”disusun sebagai syarat kelulusan dalam memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa (S2) untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Proses penyusunan dan penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan Ibu Dr.Maiyestati, SH, MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Boy YendraTamin, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan dorongan serta arahan kepada Penulis.

Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, Penulis juga bermaksud untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA., Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, SH, MHum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Dr. Maiyestati, SH, MH., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Prof. Dr. Darmini Roza, SH, MH., Dosen Penguji I Seminar Proposal dan Bapak Dr. Zarfina, SH, MH, Dosen Penguji III Seminar Proposal serta Ibu Prof. Dr. Darmini Roza, SH, MH., Dosen Penguji I Ujian Tesis dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H., Dosen Penguji II Ujian Tesis yang telah memberikan saran, kritikan serta masukan dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan Tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak/Ibu/Karyawan/i beserta Staf Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Ibu dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ibu Dra. Hj. Novita Latina, Apt selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Ibu Asni Novera, SKM selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang dan Ibu Lisa Bus Andriani selaku Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi yang Penulis butuhkan dalam penulisan Tesis ini.



8. Bapak Drs. Afriadi, MSi, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Ibu Dra. Indriati, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Bapak Mustafa Kamal, SE, Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Padang dan Bapak Riko Marvella, SKom, Fungsional di Dinas Sosial yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi yang Penulis butuhkan dalam penulisan Tesis ini.
9. Ibu Yessy Rahimi, S.Farm, Apt, MPH, selaku Kepala BPJS Cabang Padang, Bapak Debi Mersah Putra, SE selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Cabang Padang dan Reza Hadi Saputra Raffalli, Staf Komunikasi Publik dan Hukum BPJS Cabang Padang, yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi yang Penulis butuhkan dalam penulisan Tesis ini.
10. Yang teristimewa dengan tulus dan ikhlas untukmama tercinta, adik-adik serta anak-anak Penulis yang senantiasa mendoakan dan melimpahkan kasih sayangnya kepada Penulis dengan bantuan moril dan material, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
11. Seluruh teman di jajaran Redaksi Harian Khazanah Padang dan teman-teman di Kantor Hukum Mitra Wahana Padang, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan dukungan dan semangat hingga Tesis ini selesai.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selalu saling support dan menyemangati satu sama lain.

13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa Bapak, Ibu dan rekan-rekans ekalian.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik, serta masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hokum khususnya hokum kesehatan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Padang, Maret 2022**

**Penulis,**

**Devi Diany**

**NPM. 1910018412023**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

### BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	23

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.....	30
B. Implementasi Peraturan Daerah.....	35

1. Pengertian Implementasi.....	35
2. Pengertian Peraturan Daerah.....	37
<b>C. Tinjauan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).....</b>	<b>41</b>
1. Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Nasional.....	41
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	47
3. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).....	51
4. Pengertian Penduduk dan Penduduk Miskin.....	53
5. Integrasi Jamkesda ke JKN.....	55
<b>D. Tinjauan Tentang BPJS Kesehatan.....</b>	<b>57</b>
1. Sejarah Berdiri BPJS Kesehatan.....	57
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPJS Kesehatan.....	60

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 dalam Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin di Kota Padang Sebelum Terintegrasi dengan JKN.....</b>	<b>63</b>
1. Kepesertaan Program Jamkes Sumbar Sakato.....	63
2. Integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke Program JKN.....	66
<b>B. Implementasi Jamkes Sumbar Sakato Terintegrasi dengan JKN Bagi Penduduk Miskin yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan di Kota Padang.....</b>	<b>72</b>
1. Prosedur Pendaftaran Sebagai Peserta BPJS Kesehatan Bagi Penduduk Miskin.....	72

2. Kerja Sama Pemerintahan Kota Padang dengan BPJS Kesehatan.....	80
C. Solusi Bagi Penduduk Miskin yang Tidak Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Kesehatan Saat Sakit.....	82
Penduduk Miskin Mendaftar ke Dinas Sosial.....	82
Perjuangan Penduduk Miskin Menjadi Peserta Jamkes Sumbar Sakato.....	88
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Data Peserta Jamkes Sumbar Sakato Kota Padang yang Terintegrasi JKN.....	71
Tabel. 2	Rekapitulasi Peserta Jamkes Sumbar Sakato Kota Padang Terintegrasi JKN per Kecamatan Tahun 2018.....	74
Tabel. 3	Rekapitulasi Peserta Jamkes Sumbar Sakato Kota Padang Terintegrasi JKN per Kecamatan Tahun 2019.....	75
Tabel. 4	Rekapitulasi Peserta Jamkes Sumbar Sakato Kota Padang Terintegrasi JKN per Kecamatan Tahun 2020.....	76
Tabel. 5	Rekapitulasi Peserta Jamkes Sumbar Sakato Kota Padang Terintegrasi JKN per Kecamatan Tahun 2021.....	77
Tabel. 6	Pengesahan Usulan Perbaikan DTKS Data Rumah Tangga Periode Mei 2021.....	78
Tabel. 7	Penduduk Kota Padang yang Menjadi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2021.....	81
Tabel. 8	Rekapitulasi Peserta PBPU BP (Penduduk Miskin) Tahun 2021....	83
Tabel. 9	Responden Yang Mengajukan Permohonan Peserta Jamkes Sumbar Sakato/JKN pada September 2021.....	85
Tabel. 10	Wawancara dengan Responden.....	87



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Prosedur Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan.....	69
----------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2017